



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 26 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN KEPADA DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK**

#### **BUPATI GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 4 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik, maka untuk memperlancar dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan perlu diatur jenis perijinan yang dilimpahkan kewenangan penanganannya pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a pada konsideran menimbang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2005 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik ;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PELIMPAHAN  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN KEPADA DINAS  
PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK**

#### Pasal 1

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pelayanan perijinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, Bupati melimpahkan penyelenggaraan pelayanan perijinan dari satuan kerja perangkat daerah tertentu kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik.

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan Perijinan yang dilimpahkan kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik meliputi :
  - a. Sebagian perijinan dibidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
  - b. Sebagian perijinan dibidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
  - c. Sebagian perijinan dibidang pariwisata, informasi dan komunikasi;
  - d. Sebagian perijinan dibidang perhubungan.

- (2) Daftar rincian jenis pelayanan perijinan yang dilimpahkan kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik beserta kewenangan penandatanganannya sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan ini.
- (3) Jenis perijinan yang tidak dilimpahkan kewenangan penyelenggaraannya kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemroses sebagaimana tersebut dalam lampiran II peraturan ini.

### Pasal 3

- (1) Perijinan yang masih dalam proses penyelesaian pada suatu satuan kerja perangkat daerah wajib diselesaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud;
- (2) Penyerahan kewenangan penyelenggaraan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini disahkan melalui penandatanganan berita acara serah terima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik.

### Pasal 4

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memproses pelayanan perijinan diwajibkan melaporkan pelaksanaan perijinan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

### Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua peraturan Bupati yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 28 Juni 2006                      No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 28 Juni 2006

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.**

**DAFTAR RINCIAN JENIS PERIJINAN YANG DIIMPAHKAN KEPADA  
 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK**

NO	BIDANG	JENIS PERIJINAN	SKPD Pemroses	Penandatanganan
1	Lingkungan Hidup dan PE	a. Ijin Pengambilan Galian Golongn C  b. Ijin Penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi terdiri dari : (1) Ijin Pendiandan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan daerah 4 mil laut. (2) Ijin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi  (3) Ijin Pendirian depot lokal	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal  Dinas Perijinan dan Penanaman Modal  Dinas Perijinan dan Penanaman Modal  Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Kepala Dinas Perijinan dan PM  Bupati  Bupati  Bupati  Kepala Dinas Perijinan dan PM

2	Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal	<p>a. Surat Persetujuan / Perubahan PMA, PMDN dan non PMA, PMDN</p> <p>b. Ijin tetap dan ijin perluasan</p>	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Kepala Dinas Perijinan dan PM
3	Pariwisata, Informasi dan Komunikasi	Ijin usaha sarana pariwisata (meliputi akomodasi, rumah makan, penediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta dan penyelenggaraan kawasan wisata)	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Kepala Dinas Perijinan dan PM
4	Perhubungan	<p>a. Ijin Lokasi perairan Pelsus / reklamasi pantai (penetapan DLKR/DLKP Pelsus)</p> <p>b. Ijin Pembangunan Pelsus</p> <p>c. Ijin Pengoperasian (Penggunaan Pelus)</p>	<p>Dinas Perijinan dan Penanaman Modal</p> <p>Dinas Perijinan dan Penanaman Modal</p> <p>Dinas Perijinan dan Penanaman Modal</p>	<p>Kepala Dinas Perijinan dan PM</p> <p>Bupati</p> <p>Kepala Dinas Perijinan dan PM</p>

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**

**DAFTAR RINCIAN JENIS PERIJINAN YANG DIIMPAHKAN KEPADA  
 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK**

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>JENIS PERIJINAN</b>	<b>SKPD Pemroses</b>	<b>Penandatanganan</b>
1	Kesehatan	a. Ijin Praktek Bidan b. Ijin Praktek doter / dokter gigi (umum dan spesialis) c. Permohonan Ijin penyelenggaraan balai pengobatan / rumah bersalin / balai kesehatan ibu dan anak d. Permohonan Ijin apotik e. Permohonan Ijin laboratorium f. Perpanjangan / baru Ijin penyelenggaraan apotikal g. Permohonan Ijin fisioterapi h. Permohonan Ijin toko obat i. Permohonan Ijin praktek perawat j. Permohonan Ijin praktek berkelompok dokter spesialis k. Sertifikat penyuluh l. Sertifikat laik sehat m. Ijin perasional pest control n. Ijin praktek tarpi wicara o. Surat Ijin pengobatan tradisional Ijin Mendirikan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Bupati Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Bupati

2	Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengesahan akte pendirian koperasi</li> <li>b. Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi</li> <li>c. Pengesahan pembubaran koperasi</li> <li>d. Pembagian koperasi</li> <li>e. Penggabungan koperasi</li> <li>f. Peleburan koperasi</li> <li>g. Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi</li> </ul>	<p>Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Dinas Koperasi, UKM</p>	<p>Kepala Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, UKM</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, UKM</p>
3	Kelautan dan Perikanan	Penyelenggaraan pelelangan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Lingkungan Hidup & PE	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS)</li> <li>b. Ijin Pembuangan limbah cair</li> <li>c. Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP)</li> <li>2) Ijin Pengambilan Air bawah Tanah (SIPA) untuk sumur bor</li> <li>3) Ijin Pengambilan Air bawah Tanah (SIPA) untuk sumur pasak</li> </ul> </li> </ul>	<p>Dinas LHPE</p> <p>Dinas LHPE</p> <p>Dinas LHPE</p> <p>Dinas LHPE</p> <p>Dinas LHPE</p>	<p>Kepala Dinas LHPE</p> <p>Bupati</p> <p>Kepala Dinas LHPE</p> <p>Kepala Dinas LHPE</p> <p>Kepala Dinas LHPE</p>

		<p>4) Ijin Pengambilan Air bawah Tanah (SIPA) untuk sumur gali</p> <p>d. Rekomendasi pemanfaatan air permukaan</p> <p>e. Ijin penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, terdiri dari :</p> <p>1) Ijin pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)</p> <p>2) Ijin pendirian kilang</p> <p>3) Ijin pengumpulan dan penyluran pelumas bekas</p>	<p>Dinas LHPE</p> <p>Dinas LHPE</p> <p>Dinas LHPE</p> <p>Dinas LHPE</p> <p>Dinas LHPE</p>	<p>Kepala Dinas LHPE</p> <p>Bupati</p> <p>Bupati</p> <p>Bupati</p> <p>Kepala Dinas LHPE</p>
5	Pendidikan dan Kebudayaan	<p>a. Ijin Penyelenggaraan dan pebdirian SMP, SMA, SMK Swasta.</p> <p>b. Rekomendasi Ijin operasional dan ijin pendirian SMP, SMA, SMK Swata.</p> <p>c. Ijin Pentas Kesenian.</p> <p>d. Pendaftaran Induk kesenian.</p> <p>e. Pendirian Lembaga TPA, TPQ, Ponpes, Madrasah diniyah.</p> <p>f. Ijin endirian / Operasional TK, SD Swasta.</p> <p>g. Mendirikan / menyelenggarakan kursus keterampilan Bimbingan belajar.</p> <p>h. Ijin mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</p> <p>i. Ijin Pendirian Sekolah Sepak Bola (SSB)</p>	<p>Dinas P dan K</p> <p>Dinas P dan K</p> <p>Dinas P dan K</p> <p>Dinas P dan K</p> <p>Dinas P dan K</p> <p>Dinas P dan K</p> <p>Dinas P dan K</p> <p>Dinas P dan K</p>	<p>Kepala Dinas P dan K</p> <p>Kepala Dinas P dan K</p> <p>Kepala Dinas P dan K</p> <p>Kepala Dinas P dan K</p> <p>Kepala Dinas P dan K</p> <p>Kepala Dinas P dan K</p> <p>Kepala Dinas P dan K</p> <p>Kepala Dinas P dan K</p>
6	Perkerjaan Umum	<p>a. Ijin Pemanfaatan Tanah Pengairan</p> <p>b. Ijin Pematangan Pohan.</p> <p>c. Jasa Laboratorium.</p>	<p>Dinas PU</p> <p>Dinas PU</p> <p>Dinas PU</p>	<p>Bupati</p> <p>Kepala Dinas PU</p> <p>Kepala Dinas PU</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Ijin pemakaian Walls</li> <li>e. Ijin Utilitas Umum</li> <li>f. Ijin penggunaan tanah untuk keluar masuk.</li> <li>g. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>	<p>Dinas PU</p> <p>Dinas PU</p> <p>Dinas PU</p> <p>Dinas PU</p>	<p>Kepala Dinas PU</p> <p>Kepala Dinas PU</p> <p>Kepala Dinas PU</p> <p>Bupati</p>
7	Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Ijin Perdagangan (SIUP).</li> <li>b. Ijin Tnda Daftar Gudang (TDG).</li> <li>c. Ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</li> <li>d. Ijin Tanda Daftar Industri (TDI)</li> </ul>	<p>Dinas Perindag</p> <p>Dinas Perindag</p> <p>Dinas Perindag</p> <p>Dinas Perindag</p>	<p>Kepala Dinas Perindag</p> <p>Kepala Dinas Perindag</p> <p>Kepala Dinas Perindag</p> <p>Kepala Dinas Perindag</p>
8	Perijinan dan PM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijin Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri</li> <li>b. Ijin Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing</li> <li>c. Persetujuan prinsip, ijin usaha industri dan ijin perluasan</li> <li>d. Ijin Usaha Tetap Penanaman Modal</li> <li>e. Ijin Peruntukan penggunaan Tanah (IPPT) terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rekomendasi Fatwa Peruntukan ruang</li> <li>2) Ijin Lokasi</li> <li>3) Ijin tata Ruang</li> </ul> </li> </ul>	<p>Dinas Perijinan &amp; PM</p> <p>Dinas Perijinan &amp; PM</p> <p>Dinas Perijinan &amp; PM</p> <p>Dinas Perijinan &amp; PM</p> <p>Dinas Perijinan &amp; PM</p> <p>Dinas Perijinan &amp; PM</p> <p>Dinas Perijinan &amp; PM</p> <p>Dinas Perijinan &amp; PM</p> <p>Dinas Perijinan &amp; PM</p>	<p>Kepala Dinas Perijinan &amp; Penanaman Modal</p> <p>Kepala Dinas Perijinan &amp; Penanaman Modal</p> <p>Kepala Dinas Perijinan &amp; Penanaman Modal</p> <p>Kepala Dinas Perijinan &amp; Penanaman Modal</p> <p>Kepala Dinas Perijinan &amp; Penanaman Modal</p> <p>Bupati</p> <p>Bupati</p> <p>Bupati</p>
9	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijin rekomendasi usaha penggilingan padi kecil/ huller dan penyosohan beras</li> <li>b. Ijin retribusi penebangan kayu hutan rakyat diluar kawasan kabupaten Gresik</li> <li>c. Ijin Usaha Peternakan</li> </ul>	<p>Dinas Pertanian</p> <p>Dinas Pertanian</p> <p>Dinas Pertanian</p>	<p>Kepala Dinas Pertanian</p> <p>Kepala Dinas Pertanian</p> <p>Kepala Dinas Pertanian</p>





		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ijin pengesahan pemakaian instalasi rproteksi kebakaran</li> <li>j. Pengesahan gambar rencana</li> <li>k. Rekomendasi catering</li> <li>l. Rekomendasi jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dengan manfaat lebih baik</li> <li>m. Surat ijin usaha penempatan lembaga pelayanan penempatan swasta antar kerja lokal (SIUP, LPPS, AKL)</li> <li>n. Surat persetujuan pendirian bursa kerja khusus</li> <li>o. Surat ijin kerja tenaga asing (IKTA)</li> <li>p. Surat ijin penampungan Tenaga Kerja Indonesia</li> <li>q. Ijin pendirian lembaga latihan swasta</li> <li>r. Pengesahan peraturan perusahaan</li> <li>s. Pendaftaran perjanjian kerja bersama</li> <li>t. Ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh</li> <li>u. Pencatatan serikat pekerja / serikat buruh</li> </ul>	<p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p>	<p>Kepala Disnaker</p> <p>Kepala Disnaker</p> <p>Kepala Disnaker</p> <p>Kepala Disnaker</p> <p>Kepala Disnaker</p> <p>Kepala Disnaker</p> <p>Kepala Disnaker</p> <p>Kepala Disnaker</p> <p>Kepala Disnaker</p> <p>Kepala Disnaker</p> <p>Kepala Disnaker</p> <p>Kepala Disnaker</p>
14	Penelitian	Rekomendasi penelitian	BAPPEDA	Kepala BAPPEDA
15	Pengelolaan Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar ulang surat ijin menempati stand kios (SIM) heregreistasi</li> <li>b. Balik nama / SIM, jual beli, waris hibah</li> </ul>	<p>Kantor Pasar &amp; PK5</p> <p>Kantor Pasar &amp; PK5</p>	<p>Kepala Kantor Pasr &amp; PK5</p> <p>Kepala Kantor Pasr &amp; PK5</p>
16	Perijinan Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijin penyelenggaraan parkir oleh perorangan / kelompok</li> <li>b. Ijin penggunaan jalan kabupaten</li> <li>c. Ijin penyelenggaraan permainan ketangkisan elektronik</li> <li>d. Ijin permainan bilyard</li> </ul>	<p>Kecamatan</p> <p>Kecamatan</p> <p>Kecamatan</p> <p>Kecamatan</p>	<p>Camat</p> <p>Camat</p> <p>Camat</p> <p>Camat</p>

	e. Ijin dispensasi nikah	Kecamatan	Camat
	f. Ijin penggunaan sekolah negeri untuk digunakan swasta	Kecamatan	Camat
	g. Ijin pendirian persewaan vidio compac disc	Kecamatan	Camat
	h. Ijin pendirian salon kecantikan / potong rambut	Kecamatan	Camat
	i. Ijin pemotongan hewanoleh perorangan	Kecamatan	Camat

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**